



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERZALDI
2. Jabatan : GUBERNUR
3. NHK : 37290

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

6.162.747.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/220 m² di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.723.250.000
2. Tanah Seluas 19371 m² di BANGKA TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 523.017.000
3. Tanah Seluas 34286 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 171.430.000
4. Tanah Seluas 45754 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 228.770.000
5. Tanah Seluas 45782 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 228.910.000
6. Tanah Seluas 46953 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 234.765.000
7. Tanah Seluas 2125 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 4378 m²/70 m² di BANGKA TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.172.480.000
9. Tanah Seluas 4250 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
10. Tanah Seluas 16875 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.625.000



11. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m²/200 m² di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.533.050.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.108.428.367

F. HARTA LAINNYA Rp. 885.636.393

Sub Total Rp. 9.919.861.760

III. HUTANG Rp. 1.019.469.018

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.900.392.742

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.